

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adrian Sutedi, 2007, Peralihan Hak Atas Tanah+Pendaftarannya, Sinar Grafika : Jakarta.
- Ahmadi Miru, 2007, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, Raja Grafindo Persada : Jakarta..
- Ali Achmad Chomzah, 2002, Hukum Pertanahan; Pemberian Hak Atas Tanah Negara, Sertipikat Dan Permasalahan, Prestasi Pustaka : Jakarta.
- Ali Achmad Chomzah, 2002, Hukum Pertanahan; Pemberian Hak Atas Tanah Negara, Sertipikat Dan Permasalahan, Prestasi Pustaka : Jakarta.
- Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT Raja : Jakarta.
- Bachtiar Effendie, 1993, Kumpulan Tulisan Tentang Hukum Tanah, Alumni : Bandung.
- Bambang Waluyo, 1991, Penelitian Hukum dalam Praktek, Sinar Grafika : Jakarta
- Boedi Harsono, 2015, Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-peraturan tanah, Djambatan : Jakarta.
- Boedi Harsono (II), 2007, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Djambatan : Jakarta.
- Effendi Perangin, 1991, Hukum Agraria Indonesia Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi Hukum, CV. Rajawali : Jakarta.
- Haris Herdiansyah, 2010, Metodologi Penelitian Kualitatif, Salemba Humanika : Jakarta.
- Harun Al-Rashid, 1986, Sekilas Tentang Jual-Beli Tanah (Berikut Peraturan – Peraturanya), Ghalia Indonesia : Jakarta.
- Hasbi Ash Shiddiegy, 1984. Pengantar Fiqh Muamalah, Bulan Bintang, Jakarta, hal. 8.
- John Salindeho, 1993, Masalah Tanah dalam Pembangunan, Sinar Grafika, : Jakarta.

- Joko Subagyo, 2006, Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek, Rineka Cipta : Jakarta.
- Lili Rasjidi dan I.B Wya Putra, 1993, Hukum Sebagai Suatu Sistem, Remaja Rusdakarya : Bandung.
- M. Pahala Siahaan, 2003, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Rajawali Press : Jakarta.
- Maria Alfons, 2010, Implentasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-Produk Masyarakat Lokal Dalam Prespektif Hak kekayaan Intelektual. Universitas Brawijaya : Malang.
- Maria S.W. Sumardjono, 2008, Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Cetakan Pertama, Kompas : Jakarta.
- Masjfh Zuhdi, 1988, Studi Islam, Jilid III Muamalah, Rajawali, Jakarta, hal. 88.
- Mhd. Yamin Lubis dan Abd. Rahim Lubis, 2008, Hukum Pendaftaran Tanah, Mandar Maju : Bandung.
- Nasution S, 1992, Metode Penelitian Kualitatif, Tarsito : Bandung.
- Pjillipus M. Hadjon, 1987, Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia PT. Bina Ilmu : Surabaya.
- R. Soeroso, 2010, Perjanjian di Bawah Tangan, Alumni, Bumi Aksara : Jakarta.
- R. Subekti, 1987, Hukum Perjanjian, Citra Aditya Bhakti : Jakarta.
- Rocky Marbun, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni, Nusya A, 2012, Kamus Hukum Lengkap, Transmedia Pustaka : Jakarta.
- Saleh Adiwinata, 1980, Pengertian Hukum Adat Menurut Undang-Undang Pokok Agraria, Alumni : Bandung.
- Satijipto Raharjo, 2000, Ilmu Hukum PT. Citra Aditya Bakti : Bandung.
- Soedharyo Soimin, 2004, Status Hak dan Pembebasan Tanah, Sinar Grafika : Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1984, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press : Jakarta.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2006, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo : Jakarta.

Sunaryati Hartono, 1994, Penelitian Hukum Indonesia Pada Akhir Abad ke-20, Alumni : Bandung.

Supriadi, 2012, Hukum Agraria, Sinar Grafika : Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2010, Penelitian Hukum, Kencana : Jakarta.

Urip Santoso, 2005, Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah, Cetakan Kedua, Prenada Media : Jakarta

Urip Santoso, 2011, Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah, Cetakan Kedua, Kencana Prenada Media Group : Jakarta.

## **B. Peraturan Perundang-undangan dan lain lain**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Undang-Undang Pokok Agraria.

Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah

Undang-Undang No. 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan jo. Pasal 1 PP No. 36 Tahun 1997 tentang Pengenaan Bea Hak Atas Tanah dan Bangunan Karena Pemberian Hak Pengelolaan

Undang-Undang No. 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah.

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 1998 tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah